



PERFORMANCE ANALYSIS OF LOCAL REVENUE MANAGEMENT PARIAMAN CITY FROM 2011-2017

Sri Ayu Indrawani*¹

¹Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to determine the development and analyze the performance of PAD management in Pariaman city, which is measured by regional financial analysis, namely looking at the level of revenue of PAD, PAD growth rate, PAD effectiveness ratio, PAD elasticity ratio, and Pariaman PAD tax ratio. This type of research is descriptive research using regional financial ratio analysis. The results of the study can be concluded that the development of regional original income in the city of Pariaman experienced fluctuations every year, even though the growth of the city of Pariaman was always positive, despite an increase and decrease every year. Viewed in terms of the effectiveness of regional revenue, the effectiveness rate is above 100%, although in 2016 and 2017 it produces values below 100 but can still be classified as very effective because they still range from 75-100. In addition, from the overall elasticity level it can be said to be less elastic because the results obtained are a small majority of 1, whereas if viewed from the perspective of the accepted local tax ratio, especially at regional revenue, the tax ratio is very good because of increasing annual returns and value above 100.

Keywords: Local Government Revenue, Tax Ratio, Regional Development.

RIWAYAT ARTIKEL

Tanggal Masuk:
13 Desember 2018

Tanggal Revisi:
5 April 2019

Tanggal Diterima:
27 Mei 2019

Tersedia Online:
1 Juni 2019

*Korespondensi:

Sri Ayu Indrawani

E-mail:

ayuindrawani97@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan menganalisis kinerja pengelolaan PAD di kota Pariaman yang diukur dengan analisis keuangan daerah yaitu melihat tingkat penerimaan PAD, tingkat pertumbuhan PAD, rasio efektivitas PAD, rasio elastisitas PAD, dan Pariaman. rasio pajak PAD. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis rasio keuangan daerah. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perkembangan pendapatan asli daerah di kota Pariaman mengalami fluktuasi setiap tahunnya, meskipun demikian pertumbuhan kota Pariaman selalu positif, meskipun mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Dilihat dari efektivitas pendapatan daerah, tingkat efektivitasnya di atas 100%, meskipun pada tahun 2016 dan 2017 menghasilkan nilai di bawah 100 namun masih dapat tergolong sangat efektif karena masih berkisar antara 75-100. Selain itu, dari tingkat elastisitas secara keseluruhan dapat dikatakan kurang elastis karena hasil yang diperoleh mayoritas kecil yaitu 1, sedangkan jika dilihat dari rasio pajak daerah yang diterima khususnya pada pendapatan daerah, rasio pajak sangat besar. baik karena peningkatan pengembalian tahunan dan nilai di atas 100.

Kata Kunci: Pendapatan Daerah, Rasio Pajak, Pembangunan Daerah.

JEL: H20; R50.

Pendahuluan

Pembangunan daerah merupakan salah satu agenda pembangunan nasional yang dilaksanakan dengan tujuan memberikan kesempatan untuk pengembangan demokratisasi dan kinerja pemerintah daerah, demi peningkatan kesejahteraan rakyat dan mengembangkan potensi daerahnya. Salah satu wujud untuk mengembangkan demokratisasi dan kinerja pemda adalah Otonomi daerah. Otonomi Daerah merupakan proses penyerahan sejumlah kekuasaan/wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang diikuti oleh faktor-faktor penting lainnya. Menurut UU No.32 Tahun 2004 (Pasal 1 angka 6 dan 7) Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu serta berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri dan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara kesatuan.

Dengan adanya otonomi daerah maka daerah akan menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung lagi pada pemerintah pusat, sehingga pemda dan masyarakat akan berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Kemandirian dalam mengelola kepentingan daerahnya sendiri telah mengajarkan daerah untuk mampu bertindak dengan baik, yang mana harus disertai dengan kemampuan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan tersebut baik dari segi finansial, sumberdaya manusia (SDM), maupun kemampuan pengelolaan manajemen pemerintah daerah. Otonomi daerah akan tetap bertahan ketika pemerintah daerah masih mampu dalam membiayai dan mengelola daerahnya.

Salah satu pendapatan daerah yang dikelola oleh daerah itu sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dengan demikian PAD merupakan kekayaan yang dimiliki oleh daerah yang menjadi sumber dana daerah dalam menjalankan segala program yang telah direncanakan.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah dan salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah daerah dan membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan untuk menggambarkan besarnya pendapatan dan pengeluaran, mengukur kemampuan dan potensi daerah dan lain sebagainya tergambar dalam APBD.

Untuk meningkatkan APBD daerah dan keluasaan dalam penyusunan anggaran maka daerah juga harus meningkatkan penerimaannya agar program daerah yang terancang terlaksana dengan baik. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang penting dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pembangunan. Akan tetapi, pada kenyataannya struktur kontribusi PAD pada banyak daerah memiliki kontribusi yang relatif kecil dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, secara umum penerimaan daerah yang paling banyak berasal dari pemerintah atau instansi tinggi lainnya, hal ini menunjukkan ketergantungan yang sangat besar dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Dengan demikian, daerah harus mampu untuk lebih meningkatkan dan menggali potensi daerahnya demi terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang baik dan mampu membiayai belanja rumah tangganya sendiri.

Kota Pariaman merupakan salah satu kota yang terletak di Sumatera Barat. Kota Pariaman diresmikan sebagai daerah otonom pada tanggal 2 Juli 2002 berdasarkan Undang-un-

dangNomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya kota ini berstatus *kota administratif* dan menjadi bagian dari kabupaten Padang Pariaman.

Pertumbuhan perekonomian Kota Pariaman sejak menjadi daerah otonom pada tahun 2002 mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan daerahnya pada tahun 2014-2017. Berikut adalah pertumbuhan penerimaan daerah kota Pariaman:

Tabel 1: Penerimaan Daerah Kota Pariaman Tahun 2014-2017

Jenis Penerimaan Daerah Kota Pariaman	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Pendapatan Pajak Daerah	4.839.643.402	5.961.977.273	6.651.971.310	8.304.791.195
Pendapatan Retribusi Daerah	2.430.794.204	2.696.873.202	3.371.154.780	3.369.770.163
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	4.277.041.035	4.785.269.530	4.846.776.943	6.290.774.658
Lain-lain PAD yang Sah	15.130.347.522	16.453.169.132	14.822.138.136	12.916.510.096
Dana Perimbangan	4.412.871.718.214	453.544.697.798	533.629.510.758	515.176.988.201
Dana Bagi Hasil Pajak	13.519.117.379	8.012.718.800	12.093.898.078	13.263.238.050
Dana Hasil Bukan Pajak	3.073.402.835	6.180.841.998	2.131.002.726	1.091.771.997
Dana Alokasi Umum	386.256.228.000	389.745.497.000	422.666.213.000	415.241.327.000
Dana Alokasi Khusus	38.438.430.000	49.605.640.000	96.738.396.954	85.580.651.154
Lain Pendapatan yang Sah	142.362.000	7.674.854.725	3.719.276.954	65.265.832.682
Hibah	0	0	0	12.638.983.711
Dana bagi hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	15.346.507.700	16.322.179.772	21.030.606.162	20.208.084.960
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	68.911.335.000	50.692.627.000	0	7.500.000.000
Total Penerimaan	4.965.236.927.291	1.011.676.346.230	1.121.700.945.801	1.166.848.723.867

Sumber : Data BPS diolah

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan PAD di Kota Pariaman dari tahun 2014-2017 mengalami fluktuasi, dimana penerimaan tertinggi berada pada tahun 2014 dengan total penerimaan sebesar Rp. 4.965.236.927.291, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 1.011.676.346.230, selanjutnya mengalami kenaikan kembali pada tahun 2016 sebesar 1.121.700.945.801, dan tetap meningkat pada tahun 2017 yaitu sebesar 1.166.848.723.867. Dengan demikian, menggambarkan bahwa kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD sangat erat kaitannya dengan peningkatan kemandirian daerah dalam mengelola dan mengatur keuangan daerah.

Semakin besar PAD yang dihasilkan oleh suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian daerah tersebut, karena pemda mampu mengurus rumah tangganya sendiri dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Dengan semakin tingginya kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD maka semakin besar pula aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Akan tetapi salah satu problema yang terjadi saat ini, hampir sebagian besar Kabupaten/Kota di Indonesia dewasa ini adalah berkisar pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Masalah ini muncul karena adanya kecenderungan berpikir dari sebagian kalangan birokrat di daerah yang menganggap bahwa parameter utama yang menentukan kemandirian suatu Daerah di era Otonomi adalah terletak pada besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Realitas mengenai rendahnya PAD pada sejumlah daerah di masa lalu, akhirnya mengkondisikan daerah untuk tidak berdaya dan selalu bergantung pada bantuan pembiayaan atau subsidi dana dari Pemerintah Pusat. Untuk itu pada penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana kinerja pengelolaan PAD yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Kota Pariaman, dengan judul "*Analisis Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pariaman Dari Tahun 2011-2012*".

Telaah Literatur

Pendapatan Asli Daerah

Defenisi

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah (Nurcholis, 2007). Sedangkan Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Halim (2001) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang dikelompokkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan salah satu sumber keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian daerah untuk memajukan dan memeratakan pembangunan daerahnya serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah dapat berasal dari dana perimbangan pusat dan dari daerah itu sendiri yakni pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam

wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri atas:

1. Hasil pajak daerah yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada semua objek pajak, seperti orang / badan, benda bergerak / tidak bergerak.
2. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa/ fasilitas yang berlaku oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain laba dividen, penjualan saham milik daerah.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain hasil penjualan aset tetap dan jasa giro (Sirozujilam dan Mahalli, 2011 dalam [Muhtarom, 2015](#)).

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD

Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota memiliki kontribusi yang banyak pada APBD, berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain- lain pendapatan asli daerah yang sah. Perimbangan dana keuangan antara pusat dan daerah akan stabil jika pemerintah daerah mampu mengelola dan mengatur keuangan daerahnya dan membiayai segala aktivitas daerah untuk meningkatkan pembangunan. Dan ini akan terlihat pada kemampuan suatu daerah untuk menjadi daerah otonom, yang mampu menggali potensi-potensi daerahnya. Sehingga pemerintah pusat semaksimal mungkin terlibat dalam mengatur keuangan daerah otonom. Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah berhasil jika keuangan daerah mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan perekonomian di daerah tersebut tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan rasa keadilan dalam masyarakat serta dengan biaya untuk mendapatkan penerimaan daerah secara efektif dan efisien.

Inti dari desentralisasi fiskal adalah menciptakan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan daerah. Dalam hubungannya dengan pendanaan, desentralisasi fiskal merupakan faktor utama bagi kelancaran penyediaan dana pembangunan daerah dapat berjalan secara maksimal. Pendapatan asli daerah merupakan variabel utama untuk menentukan tingkat kemandirian daerah atau sering disebut dengan derajat desentralisasi fiskal. Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah salah satunya bisa diukur melalui kinerja atau kemampuan keuangan daerah, dengan menggunakan alat analisis Derajat Desentralisasi Fiskal. Derajat desentralisasi fiskal ditentukan berdasarkan rasio pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar nilai derajat desentralisasi fiskal tersebut maka semakin besar pula kemandirian daerah dalam pendanaan tugas daerah.

Analisis Kinerja PAD

Tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat terlihat dari PAD yang dihasilkan. Semakin besar tingkat PAD yang dihasilkan maka APBD dapat tersusun dengan baik, dan kemajuan daerah dapat tercapai. Dalam meningkatkan PAD yang dihasilkan suatu daerah perlu diukur dengan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, semakin baik kinerja pemerintah maka semakin bagus pula tingkat PAD yang dihasilkan.

Untuk mengetahui kinerja PAD yang dikelola oleh pemerintah daerah dan didukung oleh masyarakat dapat dilihat dari rasio keuangan daerah. Rasio Keuangan Daerah dapat terlihat dari analisis laporan keuangan. Menurut [Harahap \(2007\)](#) Analisa laporan keuangan berarti menguraikan pospos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang

lain baik antara data kuantitatif, maupun data non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

Selain itu, dilihat dari sudut pandang yang lain Analisis laporan keuangan (*financial statement analysis*) adalah hubungan antara suatu angka dalam laporan keuangan dengan angka lain yang mempunyai makna atau dapat menjelaskan arah perubahan (*trend*) suatu fenomena (Soemarso, 2005). Dengan adanya laporan keuangan maka akan menambah informasi yang lebih banyak dalam mengetahui keuangan suatu daerah dalam meningkatkan kemajuan pembangunan dan ekonomi daerah.

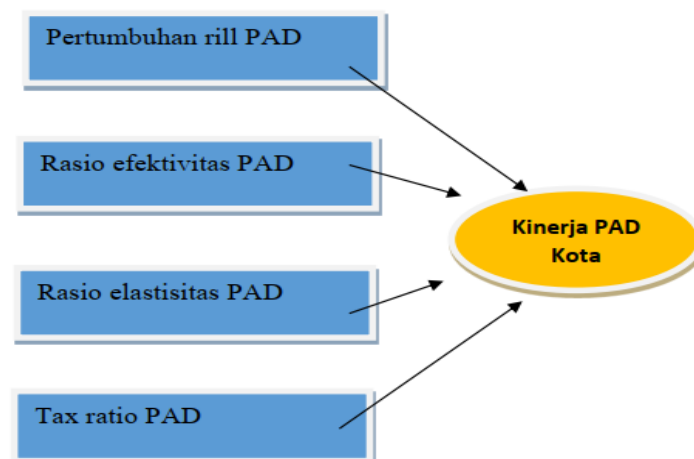
Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan yang dikemukakan dalam perumusan masalah yang akan diuji kebenarannya. Berdasarkan perumusan masalah, teori, konsep, serta kerangka pemikiran yang sebelumnya disajikan, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga pengelolaan Kinerja PAD Kota Pariaman mengalami peningkatan dari tahun 2011-2017.
2. Diduga tingkat pertumbuhan rill PAD Kota Pariaman mengalami peningkatan dari tahun 2011-2017.
3. Diduga tingkat rasio efektivitas PAD Kota Pariaman mengalami peningkatan dari tahun 2011-2017.
4. Diduga rasio elastisitas PAD Kota Pariaman mengalami peningkatan dari tahun 2011-2017.
5. Diduga tax ratio pada PAD KotaPariaman mengalami peningkatan dari tahun 2011-2017.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sintensis dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan (Hamid, 2009). Dengan demikian, kerangka konseptual akan memperlihatkan alur pemikiran dalam penelitian. Berikut kerangka konseptual yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:



Gambar 1: Kerangka Penelitian

Penelitian Terdahulu

Penelitian dari [Berwulo, Masinambow, dan Wauran \(2017\)](#) dengan judul “Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Jayapura”. Dalam penelitian ini didapatkan hasil penelitian bahwa Perkembangan pendapatan asli daerah di kota jayapura sejak tahun awal penelitian hingga tahun akhir penelitian terus mengalami pertumbuhan yang positif dan terjadi peningkatan tiap tahunnya. Efektivitas penerimaan daerah pada PAD menunjukkan angka yang positif setiap tahunnya dengan angka efektivitas diatas 100%. Sedangkan, Kemandirian kota Jayapura dalam hal penerimaan masih tergolong ama kecil, dimana awal penelitian berada pada angka dibawah 10% dan angka kemandirian tertinggi adalah 18%, ini menunjukan meskipun pendapatan asli daerah kota Jayapura terus tumbuh positif setiap tahunnya, namun belum menjanjikankemandirian karena pendapatan daerah dari alokasi anggaran pemerintah pusat masih amat besar.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh [Taras dan Sri Artini \(2017\)](#) dengan judul “Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Badung Bali”. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efisiensi pajak daerah Kabupaten Badung tahun 2011-2015 tergolong sangat efisien dan tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Badung tahun 2011-2015 tergolong sangat efektif. Kontribusi pajak daerah dalam peningkatan PAD tergolong sangat baik. Pemerintah Kabupaten Badung sudah mampu mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan mengelola penerimaan pajak daerahnya dengan baik.

Penelitian oleh [Mariani \(2013\)](#) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sesudah Pemekaran Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah dalam aspek desentralisasi fiskal sesudah pemekaran daerah. 2) Terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah dalam aspek upaya fiskal sesudah pemekaran daerah. 3) Terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah dalam aspek kemandirian pembiayaan sesudah pemekaran daerah. 4) Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah dalam aspek efisiensi penggunaan anggaran sesudah pemekaran daerah.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain ([Sugiyono, 2012](#)). Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah mendeskripsikan tentang pendapatan asli daerah Kota Pariaman dari tahun 2011-2017, data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, dimana data didapatkan dari BPS Kota Pariaman dan Laporan Keuangan Kota Pariaman.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah lokasi dimana penelitian dilakukan, hal ini analisis rasio yang dimaksud adalah menghitung tingkat pertumbuhan riil PAD, efektifitas PAD, daerah sebagai referensi. Berikut adalah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan daerah. Dalam elastisitas PAD, dan Tax Ratio PAD. Untuk menghitung rasio keuangan daerah diperlukan laporan keuangan PAD dari tahun sebelumnya yang didukung karena faktor-faktor tertentu. Ada beberapa macam penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah,

hasil kekayaan usaha daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Untuk melihat pertumbuhan PAD Kota Pariaman dalam 7 tahun penelitian yaitu dari tahun 2011-2017 dapat menggunakan rumus :

$$G = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\% \quad (1)$$

Keterangan:

G = Tingkat pertumbuhan

AD(t) = Jumlah PAD tahun sekarang

AD(t-1)= Jumlah PAD tahun sebelumnya

1) Pertumbuhan Penerimaan Riil Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pertumbuhan Penerimaan riil PAD salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan PAD. Pertumbuhan PAD merupakan suatu proses kenaikan penerimaan sedangkan waktu penelitian adalah kapan penelitian dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian ini dilakukan di Kota Pariaman dengan waktu penelitian pada bulan September sampai bulan oktober 2018.

2) Rasio Efektivitas

Menurut Halim (2001) Rasio efektivitas keuangan daerah otonom (selanjutnya disebut "Rasio EKD") menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Potensi PAD}} \times 100\% \quad (2)$$

Berikut adalah hasil Efektivitas dimana jika mendekati 100 maka tergolong efektif pelaksanaan kinerja pengelolaan PAD suatu daerah, tapi jika mendekati nol maka semakin tidak efektif pengelolaan kinerja PAD suatu daerah.

Tabel 2: Rasio Efektifitas Penerimaan PAD

No.	Nilai Efektifitas (%)	Keterangan
1.	(75-100)	Kurang Efektif
2.	(50-75)	Efektif
3.	(25-50)	Cukup Efektif
4.	(0-25)	Sangat Efektif

3) Rasio Elastisitas

Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variable lainnya. Tingkat elastisitas penerimaan PAD merupakan respon atau adanya pengaruh yang ditimbulkan dalam penerimaan PAD ini. Untuk hasil tersebut dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Ratio Elastisitas} = \frac{\text{Pertumbuhan ekonomi}}{\text{Pertumbuhan penerimaan PAD}} \quad (3)$$

Dari perhitungan tersebut jika didapatkan hasil >1 maka tergolong elastis, dan jika didapatkan hasil <1 maka tergolong inelastis.

4) Tax Ratio

Secara sederhana Tax Ratio adalah perbandingan antara jumlah pajak dengan Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product (PDB/GDP) pada tahun yang sama. Dalam hal ini

jumlah pajak yang digunakan yaitu pajak dari PAD Kota Pariaman dan PDRB Kota Pariaman dalam harga Konstan dalam 7 periode mulai dari tahun 2011-2017. Untuk mencari tax ratio dapat menggunakan rumus :

$$\text{Tax Ratio} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{PDRB}} \times 100\% \quad (4)$$

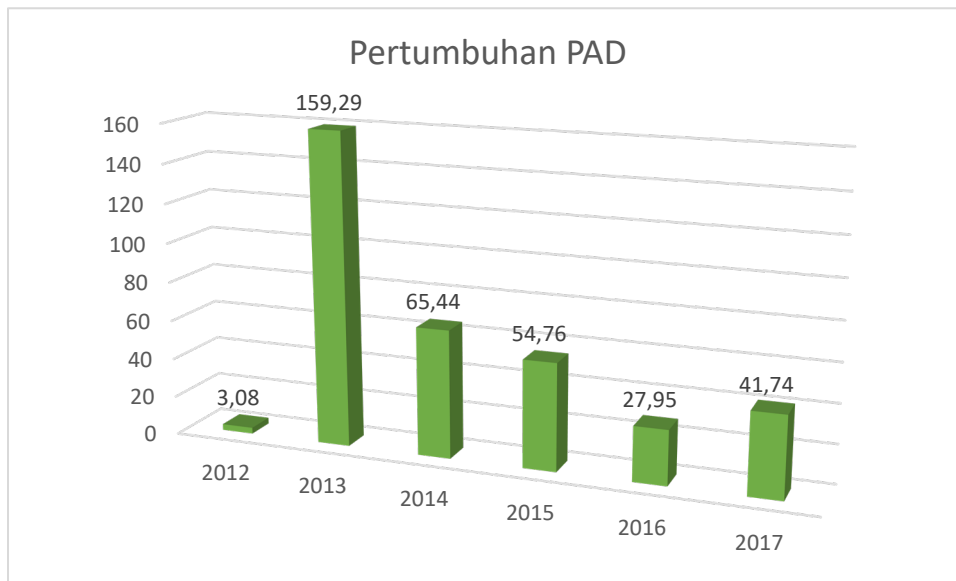
Karena pada rasio pajak juga melihat Trand penerimaan pajak yang merupakan salah satu penerimaan PAD maka jika angkanya atau hasil yang didapatkan mendekati 100% atau bahkan Lebih dari 100% maka dapatdikatakan baik/bagus.

Pertumbuhan Penerimaan Rill Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan dari data diatas didapatkan bahwa penerimaan PAD dan Rata-Rata Pertumbuhan PAD Kota Pariaman (%) mengalami naik turun. Dimana pada tahun 2012 pertumbuhan PAD di Kota Pariaman sebesar 3,08% dengan penerimaan sebesar 17638056000,00, kemudian pada tahun 2013 meningkat sangat drastis yaitu 159,29% dengan penerimaan sebesar 20639404314,00. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2013 pemerintah Kota Pariaman mengadakan pelatihan kerja dan lebih memperhatikan sektor perdagangan dan pariwisata yang lebih intensif.

Tabel 3: Realisasi Penerimaan PAD Kota Pariaman Tahun 2011-2012

PAD Tahun	Pendapatan Pajak Daerah (Rp)	Pendapatan Retribusi Daerah (Rp)	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (Rp)	Lain-lain PAD yang Sah (Rp)
2011	2.450.440.753,00	1.753.263.722,00	4.000.077.357,00	9.160.929.435,00
2012	3.103.926.000,00	1.313.955.000,00	4.058.646.000,00	9.161.529.000,00
2013	3.852.668.277,00	2.912.281.066,00	4.523.786.806,00	9.350.668.165,00
2014	4.839.643.402,00	2.430.794.204,00	4.277.041.035,00	15.130.347.522,00
2015	5.961.977.273,00	2.696.873.201,87	4.785.269.530,00	16.453.169.131,63
2016	6.651.971.310,00	3.371.154.780,00	4.846.776.943,00	14.822.138.135,91
2017	8.304.791.195,00	3.369.770.163,00	6.290.774.658,00	12.916.510.096,42



Gambar 2: Grafik Pertumbuhan PAD Kota Pariaman Tahun 2012-2017

Selanjutnya pada tahun 2014 PAD kota Pariaman mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 65,44% dengan penerimaan sebesar 26677826163,00, dilanjutkan kembali pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan sebesar 54,76 % dan 27,95% dengan penerimaan sebesar 29897289136,50 dan 29692041168,91, penurunan ini disebabkan karena banyaknya masyarakat yang tidak menbayarkan pajak, dan juga dari pengelolaan kekayaan alam berada di Kota Pariaman yang tidak terkontrol dengan baik maka dari itu menyebabkan menurunnya pendapatan. Akan tetapi pada tahun 2017 PAD kota Pariaman kembali mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 41,74% dengan penerimaan sebesar 30881846112,42. Sehingga dari tahun 2012-2017 terdapat pertumbuhan dan penerimaan PAD yang sangat tinggi di Kota Pariaman yaitu pada tahun 2013 sebesar 159,29% dengan penerimaan yang tidak begitu besar yaitu hanya sekitar Rp. 20 Milyar hal ini disebabkan karena nilai penerimaan PAD yang dihasilkan pada tahunnya jauh lebih kecil dari pada periode 2013, dan terendah pada tahun 2012 sebesar 3,08% hal ini disebabkan karena pengelolaan pendapatan kekayaan daerah tidak diberikan sepenuhnya untuk daerah kota Pariaman, contohnya seperti hasil alam yang sudah diambil oleh masyarakat, seharusnya masyarakat harus mengeluarkan pajak sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah daerah setempat. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi. Hal ini dapat pula terjadi karena tingkat hasil penerimaan PAD yang beragam pula dari tahun 2012-2017, seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

Rasio Efektivitas

Tabel 4: Efektivitas Penerimaan PAD Kota Pariaman Tahun 2011-2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Potensi	Efektifitas Penerimaan PAD
2011	17364711267,00	15358826357,00	113,06 %
2012	17638056000,00	16303776000,00	108,18 %
2013	20639404314,00	17949564806,00	114,99 %
2014	26677826163,00	20586706403,00	129,59 %

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Potensi	Efektifitas Penerimaan PAD
2015	29897289136,50	27451580059,00	108,91 %
2016	29692041168,91	33298813558,30	89,17 %
2017	30881846112,42	34601974884,47	89,25 %
Total	172791174161,83	165551242067,77	753,14 %

Sumber : Data BPS diolah

Rasio efektifitas adalah salah satu cara untuk mengukur kinerja pengelolaan PAD dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan PAD dengan potensi penerimaan PAD dikali dengan 100%, jika hasil yang didapatkan lebih dari atau mendekati 100% maka dapat dikatakan kinerja PAD sangat efektif, dan sebaliknya. Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat efektifitas pengelolaan PAD pada Kota Pariaman dari tahun 2011-2017 berfluktuasi yaitu dari tahun 2011 penerimaan PAD Kota Pariaman sebesar 113,06 % artinya kinerja PAD Kota Pariaman sangat efektif, kemudian tahun 2012 sebesar 108,18% dapat dikatakan sangat efektif pula karena melebihi 100 walaupun menurut dari tahun sebelumnya, kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2013 dan 2014 sebesar 114,99% dan 129,59%, dan tergolong masih sangat efektif. Kemudian pada tahun 2015, 2016 dan 2017 kembali mengalami penurunan 108,91 %, 89,17%, dan 89,25 % walaupun mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai 2017 pengelolaan PAD Kota Pariaman masih dapat digolongkan pada sangat efektif karena hasil yang didapatkan masih berkisar antara 75 %- 100%.

Dengan demikian dari data yang dihasilkan dapat disimpulkan tingkat efektifitas penerimaan PAD Kota Pariaman adalah sangat efektif, hal ini terbukti pada terjadinya kemajuan dari pembangunan Kota Pariaman, dan intensif memperhatikan sektor yang potensial seperti pertanian dan pariwisata/perdagangan.

Rasio Elastisitas

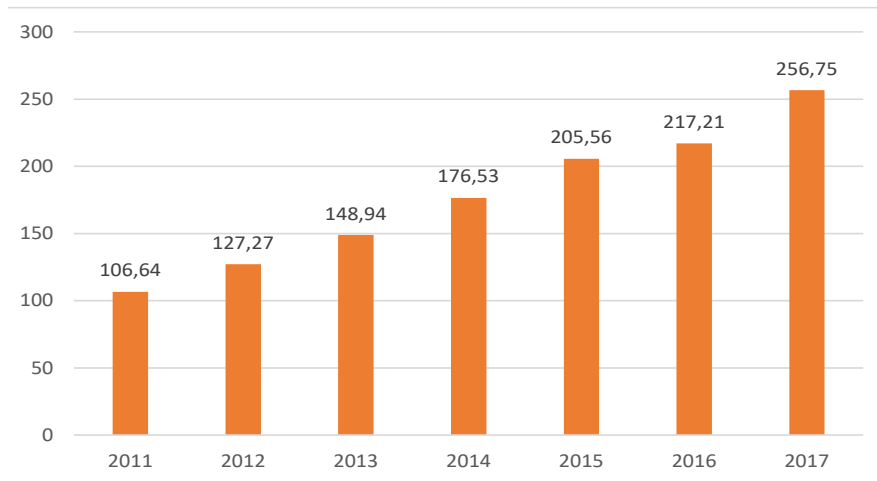
Tabel 5: Elastisitas Penerimaan PAD Kota Pariaman Tahun 2012-2017

Tahun	Pertumbuhan PAD (%)	Pertumbuhan PDRB (%)	Elastisitas Penerimaan PAD
2012	3,08	10,89	0,03
2013	15,9	10,69	1,49
2014	64,44	12,01	0,54
2015	54,76	10,92	0,50
2016	27,95	10,24	0,25

Tingkat elastisitas penerimaan PAD merupakan respon atau adanya pengaruh yang ditimbulkan dalam penerimaan PAD ini. Elastisitas merupakan perbandingan antara pertumbuhan PAD dibagi dengan pertumbuhan PDRB, jika hasil yang didapatkan lebih dari 1 (>1) maka pengelolaan PAD dapat dikatakan elastis, dan sebaliknya jika hasil yang didapatkan kecil dari 1 (<1) maka disebut Inelastis. Dari data diatas didapatkan hasil bahwa pada tahun 2012 tingkat elastisitas adalah sebesar 0,03%, sedangkan pada tahun 2013 meningkat sebesar 1,49% hal ini berarti terjadinya elastisitas pada PAD, selanjutnya pada tahun 2014 mengalami penurunan lagi sampai tahun 2016 yaitu sebesar 0,54%, 0,50%, dan 0,25% hal ini menggambarkan bah-

wa tingkat elastisitas PAD kota Pariaman semakin tidak elastis, akan tetapi pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,40%. Jadi, secara umum elastisitas PAD Kota Pariaman hanya pada tahun 2013 yang mencapai nilai besar dari 1 yaitu 1,49% ini berarti dari tahun 2012-2017 hanya pada tahun 2013 yang mengalami elastisitas. Sedangkan pada tahun-tahun yang lain dari tahun 2012-2017 tidak elastis karena angkanya kecil dari 1.

Tax Ratio



Gambar 3: Grafik Tax Ratio PAD Kota Pariaman tahun 2011-2017

Tax ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak daerah dengan PDRB dikalikan 100. Jika hasil yang didapatkan besar dari 100 maka dapat dikatakan baik/bagus. Karena pada rasio pajak juga melihat trend penerimaan pajak yang merupakan salah satu penerimaan PAD maka nilai pajak yang dihasilkan haruslah tinggi agar penerimaan PAD menjadi meningkat.

Dari hasil data yang didapatkan menunjukkan tingkat rasio penerimaan Kota Pariaman mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana terjadi peningkatan dari tahun 2011 sampai tahun 2017, dimulai dari tahun 2011 yaitu 106,64%, selanjutnya pada tahun 2012 sebesar 127,27%, kemudian pada tahun 2013 yaitu sebesar 148,94%, kemudian terus mengalami kenaikan pada tahun 2014 yaitu sebesar 176,53% dan tahun 2015 kembali mengalami peningkatan yang drastis sampai tahun 2017 yaitu sebesar 205,56%, 217,21% dan 256,75%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rasio penerimaan pajak daerah Kota Pariaman dapat digolongkan pada kategori bagus karena nilai yang dihasilkan tiap tahunnya berada di atas 100.

Kesimpulan

Pada penelitian ini, berdasarkan data yang dihasilkan didapatkan kesimpulan penelitian bahwa :

1. Kota Pariaman mempunyai kinerja yang baik hal ini terbukti dengan perkembangan yang terjadi pada penerimaan dan pertumbuhan riil PAD, walaupun mengalami fluktuasi tingkat kenaikan dan penurunannya tidak begitu jauh. Dari awal tahun penelitian yaitu dari tahun 2012-2017 perkembangan PAD Kota Pariaman pertumbuhan PAD selalu bergerak positif walaupun terjadi kenaikan dan penurunan.
2. Efektivitas penerimaan PAD Kota Pariaman selalu menunjukkan angka yang positif setiap tahunnya walaupun terjadi fluktuasi, hal ini terbukti pada efektivitas yang dihasilkan selalu menunjukkan angka efektivitas di atas 100% setiap tahunnya, akan tetapi pada

tahun 2016 dan 2017 hasilnya berada dibawah 100, walaupun demikian masih dapat digolongkan kepada efektif karena angkanya berkisar dari 75-100. hal ini jelas menjadi gambaran bahwa pemerintah kotaPariaman terus mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya. Bukan hanya untuk bisa mencapai target anggaran pendapatan bahkan melampaui target yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah.

3. Tingkat elastisitas PAD Kota Pariaman tiak begitu elastis, hanya pada tahun 2013 yang mengalami elastisitas karena hasil yang didapatkan melebihi 1, sedangkan untuk tahunnya lainnya yang dilakukan peneliti mengalami In elastis. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh atau respon dari penerimaan PAD tidak terlalu berpengaruh. Akan tetapi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena hasil yang didapatkan walaupun tidak 1 namun mendekati 1.
4. Pajak merupakan salah satu penerimaan daerah yang memiliki andil yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari penelitian yang dilakukan tax ratio yang dihasilkan pada setiap tahunnya mengalami peningkatan mulai dari tahun 2011-2017. Hal ini menggambarkan bahwa pengelolaan pajak terhadap penerimaan PAD Kota Pariaman sudah baik, hal ini membuktikan bahwa masyarakat di Kota Pariaman dapat berperan aktif dalam mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi kota Pariaman.

Saran

1. Diharapkan kepada Pemda Kota Pariaman untuk dapat meningkatkan kinerja pengelolaan di pemerintah kota Kota Pariaman, terlebih dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang masih belum terkelola secara maksimal agar dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal terhadap belanja pembangunan daerah.
2. Mengembangkan dan membuka sektor-sektor ekonomi potensial yang dapat menjadi sumber-sumber pendapatan daerah agar dapat meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dan tidak terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Dengan berkembangnya sektor-sektor ekonomi maka akan dapat membuka peluang usaha/kerja sehingga mengurangi tingkat kemiskinan.
3. Pemerintah seharusnya dapat meningkatkan kualitas SDA yang berpotensi di Kota Pariaman serta didukung dengan sarana dan prasarana yang tersedia. Seperti meningkatkan sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, kehutanan, dan pariwisata serta meningkatkan sarana akses pemasaran.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kota Pariaman <http://www.setneg.go.id> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002
- Halim, A. (2001). *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPPAMP YKPN
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo.
- Undang-undang RI No.28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan pendapatan daerah
- Harahap, Sofyan S. (2007). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Edisi Kesatu.PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soemarso. (2005). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat.
- Hamid, A. (2009). *“Pedoman Penulisan Skripsi FEB”*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Berwulo, L. L. D., Masinambow, V. A. J., & Wauran, P. C. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jayapura Analysis Of Local Revenue (PAD). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(01).
- Mariani, Lidia. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sesudah Pemekaran Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang
- Muhtarom, A. (2015). Analisis Pad (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2010-2015. *JURNAL EKBIS*, 13(1). <https://doi.org/10.30736/ekbis.v13i1.118>
- Taras, T., & Sri Artini, L. G. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Badung Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 6(5).